

ISSN: 0216-0243

JURNAL FILSAFAT

# DRIYARAKARA

Th. XXXII no.3/ 2011

## FILSAFAT PANCASILA



JURNAL FILSAFAT

DRIYARAKARA

FILSAFAT PANCASILA

## Daftar Isi

|  |     |
|--|-----|
| Pengantar redaksi  | 1   |
| Peta Permasalahan Pancasila Dewasa Ini<br>ANTONIUS WIDYARSONO  | 5   |
| PANCASILA: Makna dan Tantangannya sebagai<br>Dasar Negara<br>BENYAMIN SAM  | 17  |
| Pendidikan bagi Kepribadian Bangsa Indonesia<br>ANDREAS YAN  | 29  |
| Hubungan Agama dan Negara dalam Pandangan<br>Sila Pertama Pancasila<br>SIPRIANUS S. SAGOROUJOU                     | 39  |
| Kebebasan Ahmadiyah dalam Kacamata Pancasila<br>I. V. EKO ANGGUN S   | 53  |
| Pancasila dan Masalah Multikulturalisme<br>YUDI PRIYANTO   | 69  |
| Multikulturalisme dalam Masyarakat Plural<br>DOMINGGUS ARIANTO BERE DINA   | 83  |
| Demokrasi dan Pemilu Indonesia<br>LAMBERTUS BERTO TUKAN  | 95  |
| ARTIKEL LEPAS:   |     |
| SEMAR: Kebijakan Hidup Jawa<br>YOHANES DAMASCENUS ANUGRAHBAYU  | 107 |
| AIDS Drug as an Unregulated Commodity:<br>Unravelling the Limits of the Current Patent Laws<br>H. ANGGA INDRASWARA | 123 |

# PENDIDIKAN BAGI KEPRIBADIAN BANGSA INDONESIA

ANDREAS YAN<sup>1</sup>

**Abstrak:** Kesadaran akan karakter Indonesia yang multikultural mendasari Soekarno untuk mendahulukan “Kebangsaan Indonesia.” Indonesia adalah bangsa yang berakar pada kebudayaan lokal masing-masing, namun tetap terbuka terhadap kehadiran kebudayaan lain. Karena situasi geopolitik Indonesia, setiap suku bangsa tidak dapat memisahkan diri dari suku bangsa lain. Dalam kesatuan geopolitik itu, bangsa Indonesia memiliki identitas. N. Driyarkara menjelaskan identitas Indonesia itu sebagai gambaran, kepribadian menurut bangsa atau kelompok yang dicita-citakan. Gambaran tersebut termuat dalam pendidikan. Karena itu, pendidikan multikulturalisme diperlukan bagi pembentukan gambaran atau kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Namun, nasionalisme yang hendak dirawat melalui pendidikan tersebut dapat melemah akibat pengaruh kepentingan globalisasi.

**Kata-kata kunci:** Pancasila, gambaran, identitas bangsa, pendidikan multikulturalisme, inisiasi kultural, globalisasi, nasionalisme

## Pengantar

Dalam seminar terbuka mengenai Kosmopolitan<sup>2</sup>, Stan van Hooft mengemukakan bahwa nasionalisme dan rasisme adalah contoh bentuk tindakan agresif yang memisahkan kita dari orang lain atau memisahkan suatu kelompok masyarakat dari kelompok lain yang memicu perasaan lebih unggul. “Nasionalisme menjadi masalah karena terfokus pada dirinya sendiri dan ada perasaan bahwa bangsanya lebih baik dari bangsa lain. Kontras dengan kosmopolitanisme yang memandang bahwa semua individu penting dan punya nilai yang sama,” kata Stan van Hooft. Namun dalam sesi diskusi, salah seorang peserta menyanggah bahwa nasionalisme di Indonesia tidak bersifat agresif. Di Indonesia, nasionalisme justru memunculkan

solidaritas lintas etnis dan menyatukan seluruh rakyat Indonesia sehingga bisa bergerak bersama-sama memperjuangkan idealisme yang sama. Diskusi yang menarik ini memancing pertanyaan penulis: sebenarnya bagaimana melihat nasionalisme dalam konteks Indonesia?

Pertama, penulis menguraikan konsep kebangsaan dalam Pancasila yang khas karena situasi multi-etnis di Indonesia, bagaimana Pancasila mampu mengakomodasi kemajemukan kebudayaan di Indonesia. Kemajemukan kebudayaan sebagai identitas atau “gambaran” bangsa perlu dilestarikan dan diwariskan. Aspek yang berperan besar dalam proses pelestarian dan pewarisan itu adalah pendidikan. Karena itu, di bagian kedua, penulis meninjau sejauh mana pendidikan melestarikan kemajemukan tersebut. Ketiga, penulis mengungkapkan keprihatinan pada pendidikan multikultural dalam menghadapi globalisasi dewasa ini. Terakhir, penulis berpendapat bahwa pendidikan nasionalisme masih relevan bagi Indonesia saat ini.

### **Pancasila dan Multikulturalisme**

Dalam pidato di muka sidang BPUPKI, 1 Juni 1945, Soekarno merumuskan lima dasar Pancasila dengan urutan: 1. Kebangsaan, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, Perwakilan, Permusyawaratan, 4. Kesejahteraan, 5. Prinsip Ketuhanan. Dasar yang ditempatkan di urutan pertama bukan Ketuhanan, melainkan Kebangsaan<sup>3</sup>. Soekarno mengusahakan persatuan di antara kelompok nasionalis, sosialis, dan Islam. Selain itu, dia juga mencoba untuk mengakomodasi kelompok Timur Asing (India dan Cina) dengan menawarkan filsafat kemanusiaan Gandhi dan *San Min Chu-I*. Soekarno sadar bahwa meskipun kelompok Timur Asing itu merupakan minoritas, mereka mempunyai peranan penting dalam budaya dan ekonomi Indonesia. Soekarno bersedia membayar apa saja untuk mengompromikan aneka unsur.<sup>4</sup> Sila-sila berikutnya (Mufakat dan Demokrasi, Kesejahteraan, dan Ketuhanan) sebenarnya merupakan upaya-upaya untuk mempersatukan semua pendapat dari tokoh-tokoh yang mewakili rakyat dengan latar belakang keanekaragaman aliran politik, tingkat kehidupan ekonomi, dan agama-agama yang berbeda-beda.

Soekarno mengambil paham kebangsaan untuk Indonesia dari pemikiran filosofis Ernest Renan dan Otto Bauer. Bagi Soekarno, gagasan nasionalisme Ernest Renan sangat menonjolkan faktor keinginan bersama untuk bersatu<sup>5</sup>, dengan sedikit mengabaikan faktor budaya, ras, dan sosio-ekonomi. Dia tahu persis bahwa pemimpin-pemimpin dan rakyat Indonesia memiliki lebih banyak perbedaan daripada persamaan.<sup>6</sup> Namun, Soekarno melihat faktor keinginan itu belum cukup karena berpotensi hanya terjadi di

dalam satu kelompok ras, suku, agama, dan budaya. Sebagai contoh, rakyat Toraja memiliki keinginan bersama, tetapi hanya bersatu dalam batas eksklusif mereka sendiri, untuk membuktikan siapa yang lebih unggul dalam persaingan dengan yang lain.

Soekarno merujuk gagasan Otto Bauer: “Bangsa adalah satu persamaan, satu persatuan karakter, watak, yang persatuan karakter atau watak ini tumbuh, lahir, terjadi karena persatuan pengalaman (*shicksalgemeinschaft*).”<sup>7</sup> Jadi, meskipun berbeda bahasa, etnis, dan agama, namun kesamaan sejarah dan pengalaman membentuk watak bangsa. Akan tetapi, bagi Soekarno persamaan watak dan karakter saja tidak cukup. Seseorang tidak dapat mengatakan karakter Indonesia adalah rakyat Jawa, sebab Indonesia terdiri dari banyak suku. Rakyat Sunda dengan persamaan wataknya (kalau ada) tidak dapat begitu saja disebut bangsa.<sup>8</sup>

Jadi, apa bangsa menurut Soekarno? Bangsa adalah sekelompok manusia yang tidak hanya memiliki kehendak yang kuat untuk bersatu (*le désir d'être ensemble*, Renan) dan persamaan watak (*charaktergemeinschaft*, Bauer), tetapi juga tinggal di satu wilayah geopolitik yang nyata.<sup>9</sup> Soekarno menambahkan bahwa geopolitik adalah hubungan antara posisi geografis dan rasa-rasa dan kehidupan politik.<sup>10</sup>

Paham kebangsaan yang dianut Soekarno adalah nasionalisme politis, bukan nasionalisme kultural maupun etnonasionalisme.<sup>11</sup> Nasionalisme politis melihat bangsa sebagai suatu komunitas yang diikat oleh kewarganegaraan yang sama tanpa memandang latar belakang ras, etnis bahasa, atau agama. Anggota-anggota suatu negara kebangsaan merupakan satu bangsa karena dirumuskan berdasarkan asumsi kesamaan kewajiban, hak, dan kedudukan semua warga negara.<sup>12</sup> Konsep seperti inilah yang dianut Indonesia.

Baik dari Otto Bauer maupun Ernest Renan, konsep kebangsaan mereka masih berpotensi kedaerahan, tanpa ikatan satuan politik, bersifat individu. Sedangkan dalam masyarakat multikultural terdapat penerimaan dan respek terhadap perbedaan kebudayaan.<sup>13</sup> Multikulturalisme bukan hanya soal perbedaan dan identitas pada dirinya sendiri tetapi juga menyangkut hal-hal yang tertanam dan ditunjang oleh budaya, yaitu seperangkat kepercayaan dan praktik bagi sekelompok orang untuk memahami jati diri mereka dan dunia serta untuk mengatur hidup, baik individu maupun kolektif.<sup>14</sup> Dengan kata lain, prinsip kesamaan (*equality*) menyatakan

**Nasionalisme politis melihat bangsa sebagai suatu komunitas yang diikat oleh kewarganegaraan yang sama tanpa memandang latar belakang ras, etnis bahasa, atau agama.**

bahwa perbedaan budaya, etnik, bahasa dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi dan perwujudan hak-haknya sebagai anggota “negara-kebangsaan.” Politik kebangsaan yang multikultural harus mengusahakan agar komunitas kebersamaan, yaitu bangsa dan negara, tidak buyar, tetapi justru menjadi kerangka sehingga warga negara dapat mewujudkan dirinya, identitas, dan hak-haknya.<sup>15</sup> Untuk melestarikan pendekatan multikultural itu, pendidikan mengambil peranan penting.

### **Pendidikan sebagai Inisiasi Kultural**

Pendidikan adalah perbuatan fundamental manusia.<sup>16</sup> Artinya, pendidikan adalah perbuatan yang mengubah, menentukan hidup manusia, dan menyebabkan manusia menjadi manusia.<sup>17</sup> Dalam pendidikan, manusia menjalani hominisasi (penjadian manusia, bukan hewan, pembinaan manusia, seorang pribadi, subjek, yang mengerti diri, mengambil sikap, dan menentukan dirinya)<sup>18</sup> dan humanisasi (perkembangan yang lebih tinggi, yaitu kemampuan manusia untuk mengembangkan akal budinya dalam kebudayaan dan ilmu pengetahuan).<sup>19</sup> Karena itu, dengan pendidikan, manusia dibantu untuk menjadi pelaksana pembebasan-diri (*self-liberation*), dan dimampukan untuk menjadi penyelenggara kebudayaan.<sup>20</sup> Pendidikan merupakan salah satu bagian dari budaya, sejajar dengan pengembangan ekonomi, kesenian, agama, ilmu dan teknologi. Namun, pendidikan sebenarnya merupakan ujung tombak perkembangan budaya itu sendiri. Pendidikan berperan selain mengantarkan manusia pada akar kebudayaannya, juga mempertahankan identitas suatu bangsa.

Driyarkara menjelaskan konsep mengenai *gambaran*.<sup>21</sup> Gambaran bukan konsep tentang manusia pada umumnya, melainkan tentang manusia dari masyarakat itu. Misalnya, bangsa Sparta terkenal dengan pendidikan kepahlawanan. Setiap individu dari bangsa Sparta dilihat sebagai gambaran bangsanya. Perbuatan seorang Jawa dalam gambaran yang negatif disebut “tidak Jawa.” Suatu perbuatan dalam gambaran Amerika tulen memiliki sifat Amerika yang khusus. Jadi, *gambaran* dalam bentuk yang sebaik-baiknya adalah gambaran dari kepribadian nasional, yaitu kepribadian menurut suatu bangsa atau kelompok. Kesadaran tentang pedoman itu bisa kurang jelas, bisa lebih jelas. Saat gambaran lebih disadari, orang juga lebih menyadari bahwa dia mengejar suatu gambaran tertentu. Jadi, suatu gambaran tertentu dijadikan cita-cita. Bayangkan, di suatu negara ada seorang koruptor kelas kakap yang bernama Roni. Lalu, seorang ibu berkata kepada anaknya, “Kalau kelakuanmu begitu terus, kamu nanti akan menjadi Roni.” Kalimat itu mengandung gambaran yang ditolak. Sifat-sifat itu hanya terlaksana dalam

orang yang jahat dan tidak dicita-citakan. Yang dicita-citakan adalah sifat-sifat manusia yang luhur. Dapat dikatakan gambaran yang dicita-citakan identik dengan kepribadian nasional. Tentu, setiap orang tua mendidik anaknya untuk bercita-cita menjadi warga negara yang baik. Dalam mendidik gambaran tentang manusia telah dimuat.<sup>22</sup>

Lalu, apa *gambaran* bangsa Indonesia? Indonesia adalah bangsa yang berakar dalam kebudayaan lokal masing-masing, namun tetap terbuka terhadap kehadiran kebudayaan lain. Kenyataan ini disebabkan karena dalam geopolitik Indonesia, setiap suku bangsa tidak dapat memisahkan diri dari suku bangsa lain. Karena itu, *gambaran* yang dicita-citakan adalah identitas akar budaya masing-masing dan toleransi terhadap kehadiran suku budaya lain yang berbeda. Demi mendukung cita-cita tersebut, visi pendidikan dalam masyarakat multikultur adalah pemahaman tentang identitas bangsa dan keterbukaan pada kebudayaan lain.

### **Pendidikan: antara Multikulturalisme dan Globalisasi**

Multikulturalisme menjadi masalah ketika bertemu dan bergabung dengan atau dalam masyarakat global yang terbuka. Melemahnya pengertian pendidikan sebagai inisiasi kultural terjadi karena perubahan besar-besaran budaya kita akibat pengaruh globalisasi. Berhadapan dengan pengaruh globalisasi pada kebudayaan nasional kita dewasa ini, pendidikan mengalami keterpecahan. Di satu pihak, pemerintah ingin memacu sekolah-sekolah untuk berlomba mengikuti arus zaman, terutama sejak masa reformasi, dengan proyek-proyek pendidikan berorientasi global. Di lain pihak, kalangan pendidikan, terutama yang sadar budaya lokal, ragu-ragu dan mempunyai pertimbangan lain. Pendidikan budaya tradisional sering masih berupa pewarisan nilai-nilai leluhur tanpa gagasan kritis mengenai perubahan. Kebudayaan asing cenderung ditolak dan dicurigai, padahal pengaruh asing juga memberikan kontribusi kepada banyak kemajuan yang kita capai.

Negara, melalui Peraturan Presiden nomor 77/2007, mengizinkan modal asing di dunia pendidikan dengan batasan kepemilikan saham hingga 49% masuk Indonesia. Dengan demikian, perspektif ekonomi begitu kuat merasuki pengelolaan dunia pendidikan, meski telah ditetapkan syarat dan ketentuan demi menjamin kepentingan nasional. Jika pendidikan nasional diyakini sebagai sistem sosial yang berfungsi merawat visi dan misi kebangsaan, sistem pendidikan terperosok ke dalam penggerusan makna dan hakikat untuk sekedar berfungsi sebagai komoditas. Paradigma “cari untung” sama dengan penguasaan modal asing terhadap dunia pendidikan. Penguasaan teknologis disamakan dengan perkembangan manusiawi karena pendidikan atas dasar

proyek modernitas lebih menyandarkan diri pada rasio instrumental. Akibat dari pendekatan yang terpaku pada teknologi sangat terasa secara luas dalam sistem pendidikan masyarakat industrial, yang tidak menyisakan tempat bagi imajinasi mental, yang menjadi ciri berkembangnya peradaban besar.<sup>23</sup>

Driyarkara melihat tantangan banyak anak muda masuk sekolah menengah sekadar sebagai persiapan memasuki universitas. Karena tawaran kemajuan, entah dalam arti sebenarnya atau hanya ilusif, yang jelas anak-anak muda ini, kata Driyarkara, “lebih siap dan suka melepaskan milik kebudayaannya yang hanya sedikit itu sehingga mereka betul-betul terancam oleh bahaya menjadi manusia marginal (*marginal man*), manusia yang tidak berakar, manusia yang jiwanya terlantar dan bergelandangan, manusia yang sudah meninggalkan kebudayaan yang lama, tetapi belum masuk dalam dunia kebudayaan baru. Manusia semacam itu membahayakan masyarakat.”<sup>24</sup>

Peringatan Driyarkara ini masih relevan dalam kerangka pemikiran anak-anak sekolah dewasa ini. Mereka terobsesi oleh tawaran-tawaran universitas yang menjanjikan kemajuan-kemajuan modern, pekerjaan dan posisi-posisi unggul dalam masyarakat, tetapi tidak diberi perspektif budaya secukupnya. Sekolah-sekolah saat ini cenderung berfokus untuk mengejar target kelulusan, meningkatkan standar mutu, saling bersaing dalam usaha internasionalisasi. Generasi muda dituntut untuk lebih mengenal bahasa

dan cara berpikir asing. Lulus dengan standar internasional lebih menggiurkan karena lebih menjamin kesejahteraan hidup. Generasi muda, terutama yang memiliki potensi intelektual untuk membangun negeri sendiri, lebih tertarik untuk belajar dan bekerja di luar negeri.

Standar internasional dalam lembaga pendidikan, jika tidak segera diantisipasi, akan menggerus kemajemukan Indonesia. Orang-orang muda diseragamkan dengan bahasa internasional. Kemajemukan bahasa dan budaya

daerah memudar. Kemudian, Indonesia lama kelamaan akan lenyap, karena tidak ada Indonesia tanpa kemajemukan, *Bhinneka Tunggal Ika*. Karena itu, kurikulum sekolah mesti dilengkapi dengan pendidikan multikultural, yang mempertemukan kebudayaan lokal dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Pendidikan semacam ini masih kurang dijalankan dalam pendidikan di Indonesia.

**Karena itu,  
kurikulum sekolah  
mesti dilengkapi  
dengan pendidikan  
multikultural, yang  
mempertemukan  
kebudayaan lokal  
dengan kebudayaan-  
kebudayaan lain.**

## Relevansi Pendidikan bagi Nasionalisme

Sudah dikemukakan kenyataan bahwa negara bangsa Indonesia terdiri dari sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, yang secara sederhana disebut sebagai masyarakat multikultural. Inilah *gambaran* yang terumuskan dalam Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Masyarakat multikultural Indonesia yang sehat tidak bisa dibentuk secara *taken for granted* atau *trial and error*, tetapi harus diupayakan secara sistematis, programatis, terintegrasi, dan berkesinambungan. Salah satu strategi penting dalam mengakselerasikannya adalah pendidikan multikultural yang diselenggarakan melalui seluruh lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, dan bahkan informal dalam masyarakat luas.

Bikhu Parekh dalam *Rethinking Multiculturalism* mengatakan bahwa pendidikan yang baik selayaknya mencerahkan peserta didik kepada perbedaan konsep tentang hidup yang baik, akrab dengan pengalaman berhadapan dengan sistem kepercayaan dan cara-cara konseptualisasi, dan membimbing peserta didik untuk mengenal ke dalam roh kebudayaan yang lain, dengan melihat dunia yang mereka jalani dan mengapresiasi kekuatan dan keterbatasannya.<sup>25</sup>

Jika dikaitkan dengan pendidikan multikultural, multikulturalisme merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan keanekaragaman latar belakang kebudayaan dari peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Sekurangnya, dengan strategi ini, dari sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat dibentuk pemahaman berdasar atas konsep kebudayaan, perbedaan budaya, keseimbangan, dan demokrasi dalam arti luas.<sup>26</sup>

**Pendidikan multikultural kritis mengajarkan membangun rasa harga diri dalam konteks relasi dengan berbagai orang dan kelompok lainnya, tanpa merendahkan.**

Dalam hal ini, pendidikan dan kebudayaan merupakan penunjang hidup berbangsa yang amat strategis, sebab lewat kedua hal itu, sifat-sifat kesukuan yang memiliki daya tolak menolak dan memecah belah dapat diperlemah atau bahkan dihilangkan, sedangkan sifat-sifat kesukuan yang mempunyai daya tarik menarik dan saling melengkapi untuk mencapai kesempurnaan dapat dikembangkan dan disebarluaskan.<sup>27</sup> Respek terhadap orang lain itulah yang hendak ditumbuhkan.

Pendidikan multikultural kritis mengajarkan membangun rasa harga diri dalam konteks relasi dengan berbagai orang dan kelompok lainnya, tanpa merendahkan. Pendidikan multikultural menjanjikan transformasi masa depan, keadilan, dan persamaan bagi semua kelompok sosial dan budaya.

Dengan demikian, pendidikan multikultural mengaitkan pembelajaran dengan demokrasi dan mendorong kebebasan untuk membahas dan mempelajari isu yang kontroversial. Pendidikan multikultural menantang para guru untuk mengajarkan nilai-nilai demokratis tidak secara diktatorial, tetapi harus dengan cara demokratis pula.<sup>28</sup>

Upaya pendidikan membekali orang-orang muda untuk menghadapi kehidupan, tidak bisa direduksi begitu saja sebatas pemberian bekal keterampilan. Pendidikan berbasis multikulturalisme menjadi awal

**Pendidikan berbasis multikulturalisme menjadi awal menumbuhkan penghargaan pada perbedaan-perbedaan yang terjadi di sekitar generasi muda.**

menumbuhkan penghargaan pada perbedaan-perbedaan yang terjadi di sekitar generasi muda. Pendidikan demikian menjadi proses sosialisasi untuk menawarkan nilai-nilai guyub bangsanya.<sup>29</sup> Selain sosialisasi, pendidikan juga menaruh kepedulian pada humanisasi, dengan membantu peserta didik tidak hanya menjadi warga negara yang baik tetapi juga manusia yang integral, berkembang dalam aspek intelektual, aspek moral, kapasitas dan sensibilitas lainnya,

serta mampu merasa nyaman tinggal dalam kekayaan dan perbedaan dunia manusia.<sup>30</sup>

Dalam konsep pendidikan sepanjang hayat, keluarga menjadi pusat pendidikan, di sana setiap individu memperoleh nilai-nilai pluralisme dalam hidup bersama. Jika di keluarga dan sekolah anak-anak kita telah terbiasa mengalami perbedaan sebagai kekayaan yang mengembangkan pribadinya, kita dapat berharap akan masa depan Indonesia yang demokratis. Indonesia yang demokratis adalah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai penghormatan keberadaan orang lain.

**Catatan Akhir**

- 1 Mahasiswa Program Sarjana Filsafat STF Driyarkara
- 2 Seminar terbuka yang diadakan di STF Driyarkara, Selasa, 6 Oktober 2009, dengan tema *Cosmopolitanism*. Pembicara adalah Stan van Hooft, *Associate Professor of Philosophy, Faculty of Arts, Deakin University, Australia*. Paparan Stan van Hooft dapat disimak dalam Jurnal Driyarkara, edisi Ateisme Modern (Th. XXX no.1/2009).
- 3 Sila Kebangsaan ini sama dengan sila ke-3 dalam susunan Pancasila yang dikenal sekarang, yaitu Persatuan Pancasila.

- 4 Suwarno, P.J., *PANCASILA BUDAYA BANGSA INDONESIA* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 97.
- 5 Soekarno mengutip Ernest Renan , yang mengatakan bahwa syarat untuk menjadi bangsa adalah “kehendak untuk bersatu”, “*le desir d’etre ensemble*”. M. Sastrapratedja, “Pancasila sebagai Dasar Negara” (dalam diktat mata kuliah Pancasila untuk S1 STF Driyarkara, 2007), 2.
- 6 Soekarno, *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006), 156-157.
- 7 “*Eine Nation ist eine aus Schicksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft.*” Soekarno, *Filsafat Pancasila ...*, 161.
- 8 Soekarno, *Filsafat Pancasila...*, 165.
- 9 Soekarno, *Filsafat Pancasila...*, 165.
- 10 Soekarno, *Filsafat Pancasila...*, 166.
- 11 Etnonasionalisme dicirikan oleh homogenitas etnis, dimana identitas etnik dan identitas nasional tumpang tindih. Etnonasionalisme adalah paham kebangsaan yang menggunakan sentimen agama, etnis, atau rasa sebagai basisnya.
- 12 J.B. Hari Kustanto, “Krisis Negara Krisis Kebangsaan dan Kebangkitan Etnonasionalisme” (makalah dalam kuliah Antropologi Budaya untuk mahasiswa S1 STF Driyarkara, Jakarta, 2009).
- 13 Kita perlu membedakan antara pendekatan multikulturalisme dengan asimilasionisme dan monokulturalisme. Asimilasionisme adalah peleburan aneka macam identitas menjadi satu identitas tunggal yang dijunjung bersama. Jadi, satu identitas budaya yang baru dibentuk dari semua perbedaan. Monokulturalisme, sama dengan etnonasionalisme, adalah paham tentang satu kebudayaan yang memayungi semuanya. Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory* (New York: Palgrave, 2000), 7.
- 14 “*...a body of beliefs and practices in terms of which a group of people understand themselves and the world and organize their individual and collective lives.*” Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 2-3.
- 15 M. Sastrapratedja, “Postmodernisme dan Multikulturalisme dalam Pendidikan”, *BASIS*, no 7-8, tahun ke 58, 15.
- 16 Manusia ialah *homo educandus, to be educated – human need of education before reaching maturity* (Heinrich Roth, 1966)
- 17 Driyarkara, “Hominisasi dan Humanisasi”, dalam A. Sudiarja, dkk (peny), *Karya Lengkap Driyarkara*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 373.
- 18 Driyarkara, “Hominisasi dan Humanisasi”, 367-368.
- 19 Driyarkara, “Hominisasi dan Humanisasi”, 368-369.
- 20 Sindhunata, “Pendidikan yang Menyambut Dunia” *BASIS*, no 7-8, tahun ke-58, 18.
- 21 Driyarkara, “Hominisasi dan Humanisasi”, 325-326.
- 22 Driyarkara, “Hominisasi dan Humanisasi”, 327-328.
- 23 M. Sastrapratedja, “Postmodernisme dan Multikulturalisme dalam Pendidikan”, 14.
- 24 Sudiarja, *Karya Lengkap Driyarkara*, 320.
- 25 Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 227.
- 26 J. B. Hari Kustanto, “Pancasila dan Multikulturalisme” (diktat mata kuliah Pancasila untuk S1 STF Driyarkara, 2009).
- 27 Suwarno, *PANCASILA BUDAYA BANGSA INDONESIA*, 132-133.

- 28 Sonia Nieto, "Critical Multicultural Education and Student's Perspectives", dalam Stephen May (ed.), *Critical Multiculturalism, Rethinking Multicultural and Antiracist Education* (London, Philadelphia: Falmer Press, 1999), 209.
- 29 St. Kartono, "Sekolah Kebangsaan, Sekolah Rakyat Pancasila", *BASIS*, no 7-8, thn ke-58, 45.
- 30 Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 227.

## Daftar pustaka

### Buku

- Sudiarja, dkk (peny). *Karya Lengkap Driyarkara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- Parekh, Bhikhu. *Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory*. New York: PALGRAVE. 2000.
- Soekarno. *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*. Yogyakarta: Media Pressindo. 2006.
- Suwarno, P. J. *PANCASILA BUDAYA BANGSA INDONESIA*. Yogyakarta: Kanisius. 1993.

### Artikel

- Kartono, St. "Sekolah Kebangsaan, Sekolah Rakyat Pancasila", dalam *BASIS*, no 7-8, tahun ke 58. Yogyakarta: Kanisius. 2009.
- Kustanto, J. B. Hari. "Jakarta dan Etnisitas" (makalah kuliah Antropologi Budaya STF Driyarkara, 2009)
- Sastrapratedja, M. "Postmodernisme dan Multikulturalisme dalam Pendidikan", dalam *BASIS*, no 7-8, tahun ke 58. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Sindhunata. "Pendidikan yang Menyambut Dunia", dalam *BASIS*, no 7-8, tahun ke 58. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Nieto, Sonia. "Critical Multicultural Education and Students' Perspectives", dalam Stephen May (ed.), *Critical Multiculturalism, Rethinking Multicultural and Antiracist Education*. London: Falmer Press, 1999.